
THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM VALUE ON THE TAX AVOIDANCE**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE****Oleh:****Erzia Yetri¹⁾, Haryadi²⁾, Ilham³⁾**¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019*^{2&3)}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*Email: ¹⁾erziayetri18@gmail.com, ²⁾Haryadikamal@gmail.com, ³⁾Ilham_wahyudi@unja.ac.id**ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of Good Corporate Governance which is proxied by variabel managerial ownership, independent directors, the committee audit, and firm value of the Tax Avoidance at the companies listed in the Indoensia Stock Exchange Period 2013-2017. The population in this study is all the company in BEI. The sampling technique using purposive sampling. The data analysis technique used is by using multiple regression. Statistical hypothesis testing using test t. The results shows that: (1) Managerial ownership not effect on tax avoidance, (2) independent directors not effect on tax avoidance, (2) committee audit effect on tax avoidance, (4) firm value not effect on tax avoidance.

Keywords: *Good Corporate Governance, Tax Avoidance, Managerial Ownership, Independent Directors, The Committee Audit, Firm Value.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proxykan dengan variabel Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Nilai Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah *seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI*. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (2) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (3) komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (4) nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Tax Avoidance, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Nilai Perusahaan.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016).

Fenomena kasus penghindaran pajak dapat kita temui dengan adanya pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Menurut siaran pers DJP yang menyatakan Tax Amnesty berakhir pada Jumat 31 April tahun 2017 telah berlangsung cukup baik. Tercatat penerimaan pada hari Jumat pukul Rp.130 Triliun, deklarasi harta Rp.4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dalam web Keminfo menjabarkan penerimaan uang tebusan tax amnesty mencapai Rp.130 triliun, yang terdiri dari Rp.90,36 Triliun dari WP Pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rp.7,56 triliun dari OP UMK, Rp.4,31 triliun WP badan non UMKM, dan Rp.0,62 Triliun WP badan UMK. Sedangkan deklarasi harga mencapai Rp.4.813,4 Triliun, terdiri atas Rp.3.633,1 Triliun deklarasi harta di dalam negeri, dan repatriasi Rp.146,6 Triliun. Melihat antusias masyarakat yang banyak ikut dalam tax amnesty bisa dikatakan bahwasanya tidak melaporkan harta kepemilikan ke DJP merupakan tindakan penghindaran pajak.

Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batu bara takayal membuat pelaku bisnis batu bara menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis. Forbes (2018) mencatat, 7 dari 50 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya tak bisa dilepaskan dari keuntungan bisnis batu bara. Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Maftuchan Direktur Eksekutif PRAKARSA menjelaskan rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan

hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti aggressive tax planning, corporate inversion, profit shifting dan transfer mispricing.

Fenomena diatas dapat menjelaskan bahwa walaupun tax avoidance secara literal tidak melanggar hukum, namun semua pihak sepakat yang namanya penghindaran pajak merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Untuk itu perlu dipelakukan tata kelola yang baik dengan konsep *good corporate governance (GCG)*. Konsep *good corporate governance (GCG)* menjelaskan Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance (GCG)* menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya, dua aspek tersebut yaitu: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Hardware* yang lebih bersifat teknik mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan system organisasi. Sementara itu *software* yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*values*) sikap (*attitude*), dan etika keperilakuan (*behavioral ethics*) (Efendi, 2016).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah ada pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah ada pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*?
4. Apakah ada pengaruh Nilai Perusahaan terhadap *Tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Agency Theory

Jensen and Meckling (1937) dalam *Theory of The Firm, Managerial Behaviour Agency Cost and Ownership Structure* dan Scott (2015) dalam bukunya berjudul *Financial Accounting Theory* menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan agen untuk melaksanakan kepentingan prinsipal dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan.

Michael C. Jensen and William H. Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemilik perusahaan atau

investor menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada manajemen untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Manajemen diberi tanggung jawab oleh prinsipal untuk mengelola sumber daya perusahaan serta mengoptimalkan sumber daya yang dipercayakan untuk mensejahterakan pemilik baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

2.2. Agency Problem

Agency problem muncul dikarenakan adanya asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi terjadi dalam kondisi jika pihak manajemen lebih banyak mengetahui kondisi internal perusahaan dibandingkan *principal* yang dalam hal ini adalah *shareholder*.

Adanya *conflict of interest* antar *principal* dan *agent* yang dapat menimbulkan masalah *agency* atau *agency problem*, situasi ini terjadi dimana *agent* tidak melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan *principal* dan hal ini akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan manajemen yang melebar dapat menyebabkan adanya kepentingan tertentu dari manajemen untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan *shareholder* (Jensen, Michael C; Meckling, 1937).

2.3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: "komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika" (BPKP, n.d.).

2.3.1 Prinsip-Prinsip GCG

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Mekanisme Penerapan Corporate Governance

Menurut Adrian Sutedi (2012) mekanisme *good corporate governance* mekanisme eksternal dan internal perusahaan diantaranya

1. Mekanisme eksternal

Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. Mekanisme internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

- a. Kepemilikan Institusional
- b. Kepemilikan Manajerial
- c. Dewan Komisaris Independen
- d. Komite audit

2.4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pasaribu & Sulasmiyati, 2016). Berdasarkan teori Jensen, Michael C; Meckling (1937) menyebutkan bahwa pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen akan meningkat seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri.

2.5. Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen *corporate governance* karena dewan komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang memiliki fungsi untuk mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas ("Egon Zehnder International organized," n.d.)

2.6. Komite Audit

Keberadaan komite audit sudah diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN

Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Susunan komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

2.7. Nilai Perusahaan

Nilai (*value*) perusahaan yang sudah go public merupakan nilai yang tercermin dalam harga pasar saham perusahaan, sedangkan nilai perusahaan yang belum go public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (Margaretha, 2011).

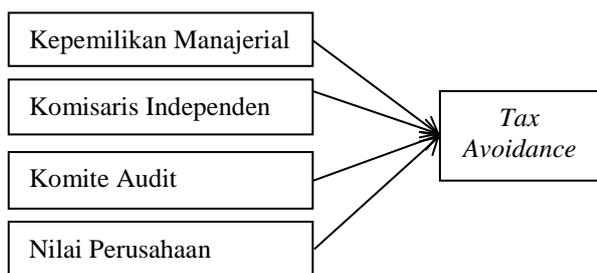
Menurut Brigham (2009), “Tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau para pemegang saham.”

2.8. Tax Avoidance

Pengertian *Tax Avoidance* menurut Lyons Susan M, yaitu Penghindaran Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum dari urusan pajak yang adil sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Seruan tersebut sering bernada merendahkan, contohnya adalah penggunaan untuk menggambarkan penghindaran yang dicapai oleh pengaturan buatan urusan pribadi atau bisnis untuk memanfaatkan celah, ambiguitas, anomali atau defisiensi hukum pajak lainnya. Legislasi yang dirancang untuk melawan penghindaran telah menjadi lebih umum dan sering melibatkan ketentuan yang sangat kompleks.

2.9. Model Penelitian

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah sendiri

Gambar 1. Model Penelitian

2.10. Hipotesis

- H1: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance.
- H2: Komisaris Independensi berpengaruh terhadap tax avoidance.
- H3: Komite Audit Independen berpengaruh terhadap tax Avoidance.
- H4: Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 yang terdiri dari 612 perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang tercatat di BEI selama periode 2013-2017
- b. Menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen yang telah dipublikasikan pada periode tahun 2013-2017.
- c. Perusahaan memiliki laba sebelum pajak yang bernilai positif pada periode tahun 2010 sampai 2013.
- d. Perusahaan memiliki Cash_ETR tahun antara 0 – 100 persen.
- e. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Manajemen khususnya level top Manajemen

Sampel yang didapat setelah memilih berdasarkan kriteria diatas, maka 48 perusahaan dari 612 perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel pada penelitian ini.

3.2. Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu Kepemilikan Manajemen, Komisaris Independen, Komite Audit, nilai perusahaan serta 1 variabel dependen yaitu Tax avoidance.

Table 1. Operasionalisasi variable

Definisi/ Variabel	Pengukuran	
	Indikator	Skala
Tax Avoidance (Y)	$Cash_ETR = \frac{\sum Cash\ tax\ Paid}{\sum Pretax\ Income}$	Rasio
Kepemilikan Manajerial (X1)	$MNJR = \frac{Jml\ saham\ komisaris}{Jumlah\ saham\ yang\ beredar} \times 100\%$	Rasio
Komisaris Independen (X2)	$PDKI = \frac{Jml\ Anggota\ Komisaris\ Independen}{Jml\ total\ anggota\ dewan\ komisaris} \times 100$	Rasio
Komite Audit (X3)	$KM = \frac{Jumlah\ Komite\ audit\ independen}{Jumlah\ seluruh\ komite\ audit} \times 100$	Rasio
Nilai Perusahaan (X4)	$Tobin's\ Q = \frac{ME + DEBT}{Total\ Aktiva}$	Rasio

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

3.3. Metode Analisis

Sesuai dengan tinjauan literatur, hal yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, aktivitas perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* maka digunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Di mana:

Y1 = *Tax avoidance*

X1 = Kepemilikan Manajerial

X2 = Komisaris Independensi

X3 = Komite Audit

X4 = Nilai perusahaan

a = Konstanta

e = Kesalahan residual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 245 data observasi yang berasal dari perkalian antara periode penelitian (5 tahun; dari tahun 2013 sampai 2017) dengan jumlah perusahaan sampel (49 perusahaan). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X1	240	,00	83,96	7,1291	14,90651
X2	240	10,00	60,00	37,2458	10,5613
X3	240	60	100	93,00	15,230
X4	240	-7,24	24,86	6,5260	6,06817
Y1	240	-16,233	40,87	,4355	3,56680

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

- 1 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan nilai minimum sebesar -16.233, nilai maksimum sebesar 40.87 dengan rata-rata sebesar 0.4355 dan standar deviasi 3.56680.
- 2 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Kepemilikan Manajerial menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 83.96 dengan rata-rata sebesar 7.12 dan standar deviasi 14.905.
- 3 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap tingkat Komisaris Independen menunjukkan nilai minimum sebesar 10.00, nilai maksimum sebesar 60.00 dengan rata-rata sebesar 37.2458 dan standar deviasi 10.5613.
- 4 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 60, nilai maksimum sebesar 100 dengan rata-rata sebesar 93.00 dan standar deviasi 15.230.
- 5 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar -7.24, nilai maksimum sebesar 24.86 dengan rata-rata sebesar 6.5260 dan standar deviasi 6.06817.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

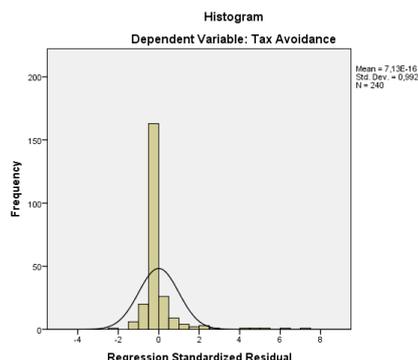
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal atau tidak. Sehingga apabila data kontinu telah berdistribusi normal maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni uji validitas, uji-t, korelasi dan regresi dapat dilaksanakan.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		240
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Dev	.99159649
Most Extreme Differences	Absolute	.306
	Positive	.306
	Negative	-.200
Test Statistic		.306
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas diketahui besarnya nilai Test Statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0.0306 dan signifikan pada 0.000 (Asymp. Sig. > 0.05) artinya residual berdistribusi normal.



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Gambar 2. Histogram

Dari grafik histogram diatas, menunjukkan pola distribusi normal, dilihat dari data yang tersebar disekitar grafik histogram dan mengikuti arah grafik histogram. Sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi syarat uji asumsi klasik untuk selanjutnya dapat dilakukan melakukan analisis hasil regresi.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

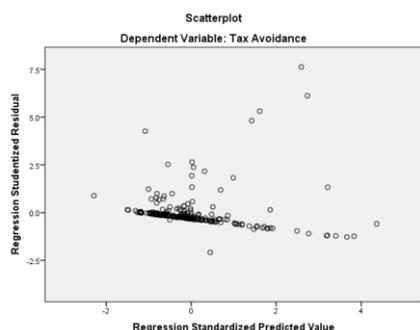
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.983	1.018
	X2	.986	1.014
	X3	.991	1.009
	X4	.978	1.023

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai *VIF* di bawah nilai 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat multikolinieritas.

4.2.3. Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas tampak bahwa pola sebaran data tidak membentuk pola tertentu, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

4.3. Uji Regresi Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,195	1,682		1,305	,193
	X1	-,004	,016	-,015	-,227	,821
	X2	,031	,022	,093	1,437	,152
	X3	-,030	,015	-,129	-2,003	,046
	X4	-,013	,038	-,022	-,345	,730

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada table 5, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Tax\ Avoidance\ (Y) = 0,157 + 0.017\ X1 + 0,66\ X2 + 2,467 + 0.02$$

Penjelasan persamaan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2.195 artinya jika Kepemilikan Manegerial, Komisaris Independen, Komite Audit dan Nilai Perusahaan tidak ada maka *Tax Avoidance* -2.195.
2. Koefisien Regresi X1 sebesar -0.004 artinya setiap kenaikan satu satuan Kepemilikan Manegerial akan meningkatkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* -0.004. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan *Tax Avoidance*, akan menurunkan

pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebesar -0.004, dengan anggapan bahwa X2,X3,X4 tetap.

3. Koefisien Regresi X2 sebesar 0.031 artinya setiap kenaikan satu satuan Komisaris Independen akan meningkatkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0.031 Dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan *Tax Avoidance*, akan menurunkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0.031, dengan anggapan bahwa X1,X3,X4 tetap.
4. Koefisien Regresi X3 sebesar -0.030 artinya setiap kenaikan satu satuan Komite Audit akan meningkatkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebesar -0.030. Dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan *Tax Avoidance*, akan menurunkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebesar -0.030, dengan anggapan bahwa X1,X3,X4 tetap.
5. Koefisien Regresi X4 sebesar -0.013 artinya setiap kenaikan satu satuan Komite Audit akan meningkatkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebesar -0.013. Dan sebaliknya, setiap penurunan satu satuan *Tax Avoidance*, akan menurunkan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebesar -0.013, dengan anggapan bahwa X1,X3,X4 tetap.
6. Tanda (+) menunjukkan arah hubungan yang searah sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antar variabel independen (X) dengan variabel dependen Y.

4.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2,195	1,682		1,305	,193
	X1	-,004	,016	-,015	-,227	,821
	X2	,031	,022	,093	1,437	,152
	X3	-,030	,015	-,129	-2,003	,046
	X4	-,013	,038	-,022	-,345	,730

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa pada variabel Kepemilikan Manegerial (X1) seperti pada tabel 12 diatas diperoleh t hitung sebesar 0.227 dengan probabilitas sebesar 0,821 yang nilainya diatas 0,05. Dengan demikian H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variable Kepemilikan Manegerial secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Hasil uji t pada variabel Komisaris Independen seperti pada tabel 6 di atas diperoleh t hitung sebesar 1,437 dengan probabilitas 0,152 yang nilainya diatas 0,05. Dengan demikian H2 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel Komisaris Independen secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Hasil uji t pada variabel Komite Audit seperti pada tabel 6 di atas diperoleh t hitung sebesar 2.003 dengan probabilitas 0,046 yang nilainya dibawah 0,05. Dengan demikian H2 diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel Komite Audit secara parsial terhadap Tax Avoidance (Y).

Hasil uji t pada variabel Nilai Perusahaan seperti pada tabel 6 di atas diperoleh t hitung sebesar 0,345 dengan probabilitas 0,730 yang nilainya diatas 0,05. Dengan demikian H2 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel Nilai Perusahaan secara parsial terhadap Tax Avoidance (Y).

4.5. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel pertumbuhan laba. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel pertumbuhan laba. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.166	.028	.011	3.54723	1.826
a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan kriteria korelasi pada Tabel 7 di atas dimana nilai koefisien penentu (*R Square*) sebesar 0,166, hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdapat pada model ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 2.8%, sedangkan sisanya sebesar 97.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model ini.

4.6. Pembahasan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya variasi *tax avoidance* tidak ditentukan oleh variabel Kepemilikan Manajerial. Sehingga dapat dikatakan variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Dengan kata lain perbandingan antara persentase saham yang dimiliki oleh manajemen dan jumlah saham yang diterbitkan (saham beredar) tidak memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

Rata-rata jumlah kepemilikan manajerial pada penelitian ini sebesar 7,12%. Hal tersebut memungkinkan bahwa pihak manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam perusahaan, karena jumlah kepemilikan manajerial masih di bawah 50%.

2. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan table 7 tentang descriptive statistics masih ditemukan sampel perusahaan yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris sedangkan pada penelitian ini nilai minimum hanya sebesar 10%. Ketidak pengaruh yang dimiliki oleh hasil penelitian ini dimungkinkan karna hasil data untuk variable komisaris cenderung tidak bervariasi sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel Komisaris Independen pada tax avoidance.
3. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Dari hasil penelitian ini pada table descriptive statistics yang menerangkan rata-rata komite audit yang dimiliki perusahaan sebesar 93% menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan sampel memiliki komite audit independen. Berpengaruhnya hasil penelitian ini dimungkinkana peran pengambilan keputusan yang cukup berpengaruh terhadap manajemen, peran komite audit independen dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan berjalan dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tetentu dapat terdeteksi oleh komite audit.
4. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, bahwa Nilai Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *tax avoidance* dipandang oleh investor dan kreditor tidak akan menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan masih mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan pemegang saham dan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat mempertahankan nilai perusahaan. Selain itu, adanya praktik *tax avoidance* dianggap masih memenuhi aturan perpajakan (*legal*). Akibatnya, praktik *tax avoidance* tidak akan mengurangi ketertarikan investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut tanpa memperhatikan praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* . Dengan kata lain perbandingan antara persentase saham yang dimiliki oleh manajemen dan jumlah saham yang diterbitkan (saham beredar) tidak memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak.

2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tax avoidance dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI
3. Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan peran komite audit independen dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan berjalan dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat terdeteksi oleh komite audit.
4. Nilai Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tax avoidance dipandang oleh investor dan kreditor tidak akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, adanya praktik tax avoidance dianggap masih memenuhi aturan perpajakan (legal).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan penulis dan atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan long-run ETR yang telah dikembangkan oleh Dyreng dkk. yang dipercaya lebih baik sebagai proksi penghindaran pajak atau dengan menggunakan proksi lain seperti Book Tax Differences (BTD) atau dengan membandingkan antara Long-run ETR dengan BTD.
3. Pengelompokkan perusahaan tergantung dengan jenis industrinya masing-masing sehingga diharapkan mampu menganalisa lebih detail tentang industri yang lebih melakukan penghindaran pajak.

DAFTAR REFERENSI

- BPKP. (n.d.). BPKP. Retrieved from www.bpkp.go.id
- Brigham, E. F. & J. F. H. (2009). *Fundamentals of Financial Management*. South Western: Cengage Learning.
- Efendi, A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Egon Zehnder International organized. (n.d.). Retrieved from <https://www.egonzehnder.com/>
- Forbes. (2018). *No Title*.
- Jensen, Michael C; Meckling, W. H. (1937). THEORY

OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Strategic Management Journal*, 13(4), 223–242. <https://doi.org/10.1002/mde.1218>

- Margaretha, F. (2011). *Teori Dan Aplikasi Manajemen Keuangan Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana.
- Pasaribu, M. Y., & Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 35(1), 154–164.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Scott, W. R. (2015). Financial Accounting. In *An introduction Macmillan* (7th ed., Vol. 1). Toronto: Ontario Pearson.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.